

---

## JURNAL PENA INDONESIA

*Jurnal Bahasa Indonesia, Sastra, dan Pengajarannya*

Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020

ISSN: 22477-5150, e-ISSN: 2549-2195

---

### KESANTUNAN BERBAHASA POLITISI DALAM ACARA DEBAT DI LIVE STREAMING VIDEO #KupasTuntas

**Mulyono**

Universitas Negeri Surabaya

*mulyono@unesa.ac.id*

#### ABSTRAK

Tulisan ini membahas kesantunan berbahasa para politisi dengan mengangkat tiga masalah, yaitu (1) bagaimana tingkat kesantunan berbahasa para politisi; (2) Bagaimana bentuk-bentuk satuan verbal yang dipakai para politisi ketika berbahasa; dan (3) Apa saja faktor yang melatarbelakangi pelanggaran dan ketaatan kesantunan berbahasa para politisi? Data diambil dari sepuluh tayangan debat antarpolitisi yang ada di live streaming video #KupasTuntas di internet. Pemilihan kesepuluh tayangan itu menggunakan teknik acak bertujuan (*purposive random sampling*) dan diperoleh enam orang politisi. Teori yang digunakan untuk menganalisis perilaku berbahasa para politisi adalah gabungan Teori Kerja Sama (Grice, 1975) dengan maksim-maksimnya dan Teori Kesantunan (Leech, 1983) dengan maksim-maksimnya. Tingkat kesantunan berbahasa para politisi diukur berdasarkan pelanggaran dan ketaatan dalam menerapkan maksim-maksim tersebut kemudian diukur dan diberi predikat sangat santun, santun, kurang santun, dan tidak santun. Hasil analisis menunjukkan bahwa bahasa yang dipakai oleh para politisi dalam berdebat masih dapat digolongkan ke dalam kategori “santun” meskipun ada beberapa yang melanggar maksim kesantunan. Beberapa maksim yang sering dilanggar dalam berkomunikasi adalah maksim penerimaan, maksim kebijaksanaan, maksim cara, maksim kerendahhatian, maksim kesimpatian, maksim kuantitas, maksim kemurahhatian, maksim relevansi, maksim kualitas, dan maksim kecocokan.

**Kata Kunci:** *kesantunan, maksim, politisi*

## **POLITENESS OF POLITICIANS IN THE DEBATE PROGRAM ON STREAMING LIVE**

Dr. Mulyono, M. Hum.  
Universitas Negeri Surabaya  
[mulyono@unesa.ac.id](mailto:mulyono@unesa.ac.id)

### **ABSTRACT**

This paper discusses politicians' politeness in language by raising three problems, namely (1) What is the politeness level of politicians' language; (2) What is the verbal unit used by politicians when speaking; and (3) What are the factors underlying the violations and obedience of politicians' language politeness? The data is taken from ten views of the inter-political debate in the #KupasTuntas video stream. The selection of the ten shows using purposive random sampling technique and obtained six politicians. Theories used to analyze their language behavior are a combination of Cooperation Theory (Grice, 1975) with their maxims and Politeness Theory (Leech, 1983) with their maxims. The politeness level of politicians is measured based on violations and obedience in applying the maxims and then measured and given the title very polite, polite, less polite, and not polite. The results of the analysis show that the language used by politicians in debating can still be classified into the "polite" category, although there are some who violate the maxims of politeness. Some of the maxims that are acceptance maxims, *tact* maxims, ways maxims, modesty maxims, sympathies maxims, compatibility maxims, relevance maxims, quality maxims, and generosity maxims.

**Keywords:** *politeness, maxim, politician*

### **PENDAHULUAN**

Berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, seluruh penduduk dunia di muka bumi ini sekarang dapat berinteraksi secara masif. Internet menjadi alat yang sangat efektif di era global ini. Berkat internet, semua program yang berbasis video dapat diunggah dan disiarkan ulang dalam frekuensi yang tak terbatas melalui live streaming di internet. Karena adanya streaming video, politisi kini dapat dengan mudah muncul di depan umum (publik) melalui chanel Youtube di internet, baik sebagai hasil dari siaran ulang acara TV sebelumnya maupun acara yang dibuat secara mandiri. Karena acaranya dapat diakses dengan mudah dari mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, maka politisi dapat dengan mudah memframing dirinya menjadi 'public figure' untuk mengoleksi calon-calon pemilihnya.

Para politisi adalah orang-orang yang aktif di bidang politik atau partai. Mereka dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang terhormat. Kemampuan berbahasanya di atas rata-rata masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, dari perilaku kesantunan berbahasanya mereka sering mendapatkan sorotan dari masyarakat. Ketika menghadapi khalayak pemilih, mereka cenderung berupaya mengajak dan mempengaruhi orang lain secara halus dengan kemampuan berbahasa yang hebat. Bahasanya cenderung bersifat membujuk dan merayu khalayak. Sebaliknya, ketika mereka berdebat dengan lawan politiknya di sebuah acara, bahasanya cenderung kasar, selalu menyerang, mengontrol, dan menjatuhkan lawan, nadanya tinggi, dan ingin menangnya sendiri. Perilaku berbahasanya yang seperti itu membuat masyarakat memberi label kepada mereka sebagai kelompok yang kurang santun, suka berbohong, suka mengumbar janji, dan tidak jujur. Jones dan Wareing (2007) bahkan menilai bahwa bahasa politisi dikonstruksi untuk membuat dusta, kedengarannya benar dan meyakinkan, namun semuanya hanyalah omong kosong belaka.

Pemberian label seperti itu tentu perlu dibuktikan dengan data-data yang sahih sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, kajian terhadap kesantunan berbahasa yang digunakan oleh para politisi perlu dilakukan.

Kajian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan (1) Bagaimana tingkat kesantunan berbahasa para politisi? (2) Apa saja bentuk satuan verbal yang digunakan oleh para politisi? (3) Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi para politisi melakukan pelanggaran atau menaati norma- norma kesantunan dalam berbahasan

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang dipakai dalam kajian ini bertumpu pada fenomenologis. Dengan metode dokumentasi dan observasi, data yang diperoleh berupa kata-kata, frasa, kalimat, dan wacana yang disampaikan oleh para politisi dalam acara debat di streaming video dikumpulkan. Data yang terkumpul dan terverifikasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan tingkat kesantunannya.

## **PEMBAHASAN**

Kajian tentang kesantunan berbahasa para politisi ini menggunakan dua teori secara eklektis, yakni gabungan Teori Kerja Sama Grice (1975) dengan maksim-maksimnya dan Teori Kesantunan Leech (1983) dengan maksim-maksimnya. Teori Kerja Sama Grice (1975) dengan prinsip kerja samanya beserta keempat maksimnya mengatur bahwa seseorang harus membuat komunikasi dengan memberi sumbangan isi seperti yang diharapkan. Prinsip kerja sama ini menawarkan harapan bahwa partisipan dalam komunikasi informal bersedia bekerja sama satu sama lain dengan memberi kontribusi dan dalam waktu sepiantasnya pada komunikasi tersebut.

Prinsip kerja sama bukan berupa nasihat agar para partisipan dalam komunikasi berperilaku baik, melainkan agar komunikasi di dalam percakapan berlangsung secara efisien. Leech (1983:82) berpendapat bahwa prinsip kerja sama yang diusulkan Grice memungkinkan para partisipan dalam suatu percakapan beranggapan bahwa partisipan lain bersedia untuk bekerja sama. Dengan demikian, prinsip kerja sama ini berfungsi mengatur apa yang harus dikatakan oleh para partisipan untuk dapat memberi sumbangan pada tujuan komunikasi.

Grice (1975) melalui maksim-maksimnya menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh para partisipan dalam suatu pertuturan untuk dapat berkomunikasi dengan cara yang efisien, rasional, dan kooperatif. Prinsip kerja sama ini memiliki beberapa maksim yang menentukan apa yang wajib dilakukan oleh setiap partisipan dalam berkomunikasi supaya tidak terjadi ketidaksantunan. Beberapa maksim harus diterapkan oleh para partisipan dalam bertutur untuk menjaga kesantunan dan untuk mencapai tujuan komunikasi. Maksim-maksim ini terdiri atas maksim kualitas, kuantitas, relevansi, dan cara.

Dalam maksim kualitas, para partisipan harus bicara jujur. Maksim ini menetapkan bahwa seseorang tidak boleh menyatakan sesuatu yang tidak diyakini kebenarannya karena tidak cukup memiliki bukti.

Maksim kuantitas menetapkan bahwa seseorang dalam menyampaikan

sesuatu hendaknya seinformatif mungkin untuk membuat interaksi dapat berlangsung dengan baik, tidak perlu terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit, dalam arti apa yang diucapkan harus jelas dengan panjang ujaran yang secukupnya.

Maksim relevansi menetapkan bahwa dalam berkomunikasi apa yang dikatakan harus jelas berhubungan dengan tujuan komunikasi. Maksim relevansi mengharuskan adanya relevansi antara apa yang diucapkan dengan tujuan interaksi, meskipun pada kenyataannya sering terjadi bahwa respons yang diberikan tampak tidak ada hubungannya dengan ujaran sebelumnya.

Dalam maksim cara, apa yang dikatakan oleh penutur harus mudah dimengerti, jelas, teratur, dan singkat, menghindari ketidakjelasan dan makna ganda. Maksim cara ini menetapkan bahwa para partisipan dalam bertutur wajib menyampaikannya secara langsung, jelas, dan tidak kabur.

Menurut Grice, jika keempat maksim kerja sama di atas diaplikasikan, komunikasi dalam percakapan akan dapat berjalan dengan baik dan santun.

Prinsip kesantunan dalam berkomunikasi, selain dinyatakan oleh Grice (1975), juga dikemukakan oleh Leech (1983) dengan beberapa maksimnya. Menurut Leech, ada enam maksim yang harus diperhatikan oleh para partisipan dalam percakapan agar proses komunikasi dapat berjalan dengan santun. Keenan maksim tersebut adalah maksim kebijaksanaan (*tact*), maksim kemurahanhatian (*generosity*), maksim penerimaan (*approbation*), maksim kerendahanhatian (*modesty*), maksim kecocokan (*agreement*), dan maksim kesimpatian (*sympathy*).

Maksim kebijaksanaan menetapkan bahwa setiap peserta tutur wajib meminimalkan kerugian bagi mitra tuturnya atau memaksimalkan keuntungan bagi mitra tuturnya. Dalam maksim kebijaksanaan ini berlaku anggapan bahwa semakin panjang tuturan seseorang maka semakin besar pula keinginan orang tersebut untuk bersikap santun pada mitra tuturnya. Maksim kemurahanhatian menetapkan bahwa setiap peserta tutur wajib meminimalkan keuntungan diri sendiri dan memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri.

Dalam maksim penerimaan setiap peserta tutur diharuskan

meminimalkan rasa tidak hormat pada mitra tuturnya dan memaksimalkan rasa hormat pada mitra tuturnya. Dalam maksim kerendahhatian setiap peserta tutur diwajibkan meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri dan memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri. Dalam maksim kecocokan setiap peserta tutur diwajibkan meminimalkan ketidaksetujuan pada orang lain dan memaksimalkan kesetujuan di antara mereka. Dalam maksim kesimpatian setiap peserta tutur diharuskan meminimalkan rasa antipati dan memaksimalkan rasa simpati pada mitra tuturnya.

Menurut Leech (1983:139), keenam maksim tersebut berpusat pada kewajiban untuk memaksimalkan keuntungan bagi mitra tutur dan meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri. Dia juga berpendapat bahwa kesantunan tidak hanya dapat diwujudkan melalui isi percakapan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui bagaimana suatu percakapan dilakukan dan diatur oleh para peserta tutur. Sebagai contoh, menyela percakapan ataupun menyampaikan pendapat pada waktu yang tidak tepat juga dapat dianggap sebagai perilaku yang tidak santun, atau diam saja dalam suatu percakapan juga dianggap sebagai perilaku yang tidak santun.

Dengan mengaplikasikan kesepuluh maksim di atas sebagai kriterianya, tingkat kesantunan berbahasa para politisi dalam debat yang disiarkan melalui live streaming video di internet dapat dinyatakan secara umum masih tergolong santun. Adapun hasil perhitungan kuantitatifnya seperti yang tergambar dalam table 1 dan 2 di bawah ini.

Tabel 1: Persentase Klasifikasi Kesantunan

No.	Sampel	Persentase	Klasifikasi
1	Politisi 1	50,17%	Kurang Santun
2	Politisi 2	32%	Santun
3	Politisi 3	54%	Kurang Santun
4	Politisi 4	27%	Santun
5	Politisi 5	21%	Sangat Santun

6	Politisi 6	36%	Santun
---	------------	-----	--------

Tabel 2: Frekuensi Pelanggaran Maksim

No.	Pelanggaran Maksim	Frekuensi
1	Maksim penerimaan	39
2	Maksim kebijaksanaan	31
3	Maksim cara	28
4	Maksim kerendahhatian	17
5	Maksim kesimpatian	15
6	Maksim kuantitas	14
7	Maksim kemurahhatian	11
8	Maksim relevansi	9
9	Maksim kualitas	7
10	Maksim kecocokan	3

Berdasarkan Tabel 2 di atas tampak bahwa maksim yang paling sering dilanggar dalam berkomunikasi adalah maksim penerimaan yang secara berturut-turut diikuti oleh maksim kebijaksanaan, maksim cara, maksim kerendahhatian, maksim kesimpatian, maksim kuantitas, maksim kemurahhatian, maksim relevansi, maksim kualitas, dan maksim kecocokan.

Berdasarkan analisis bentuk satuan verbalnya, bahasa yang digunakan oleh para politisi dalam debat yang disiarkan melalui live streaming video di acara #KupasTuntas di internet tergambar dalam bentuk pilihan kata, deklaratif, imperatif, dan fitur-fitur prosodik. Satuan verbal yang tampak dominan dipakai para politisi adalah pilihan kata yang lebih mengacu kepada kekuasaan dan pemerintahan, misalnya kata pilpres, pilkada, pileg, koalisi, presiden, menteri, kebijakan, pemerintah, anggota DPR dsb. Bentuk pilihan kata pada kata-kata tertentu yang berima apik dipakai untuk menonjolkan diri dalam pertuturan dan menarik perhatian.

Satuan verbal lain yang dipakai para politisi ialah berupa bentuk deklaratif yang berstruktur kalimat kompleks yang panjang. Dapat dinyatakan

bahwa jenis kalimat deklaratif yang digunakan oleh para politisi terkait dengan tugas mereka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang apa saja yang telah dan akan mereka kerjakan sebagai bagian dari sosialisasi program kerja dan promosi /kampanye agar masyarakat mau memilih dirinya atau partainya. Bentuk kalimat deklaratif dipakai karena jenis kalimat ini lebih sesuai digunakan untuk menyampaikan program-program yang ditawarkan agar lebih mudah dipahami. Pilihan ini merupakan bagian dari salah satu strategi kesantunan, yaitu ‘mengurangi beban bagi mitra tutur’. Mengapa para politisi lebih banyak menggunakan kalimat kompleks pada saat debat? Hal ini ada kaitannya dengan keinginan untuk mendapatkan kesempatan berbicara lebih banyak untuk menguasai jalannya percakapan. Struktur kalimat kompleks yang cenderung panjang membuat pembicaraan sulit dipotong atau disela lawan tutur atau pembawa acara. Cara ini mengarah pada adanya dominasi dan ini merupakan pelanggaran terhadap maksim kesantunan karena tidak menghargai keberadaan partisipan lain yang juga memiliki hak untuk berbicara.

Selain bentuk kalimat deklaratif, bentuk kalimat imperatif juga banyak digunakan para politisi. Kalimat imperatif dapat berupa perintah biasa, perintah halus, ajakan, atau bahkan larangan. Dalam penggunaannya, para partisipan kadang-kadang juga memakai kata "tolong". "mari", "-lah", dan "silakan". Pemakaian kata penghalus tersebut merupakan aplikasi dari maksim penerimaan karena pembicara menghormati mitra tuturnya. Penggunaan verba aktif dalam kalimat-kalimat yang diucapkan para politisi juga dapat diinterpretasikan bahwa bagi mereka siapa yang melakukan adalah penting artinya. Apabila yang disebut ialah hal-hal yang menguntungkan mitra tutur, maka pembicara sebenarnya mengaplikasikan maksim kebijaksanaan. Akan tetapi, apabila yang disebut itu berupa hal-hal yang merugikan mitra tutur, pembicara justru dapat melanggar maksim kebijaksanaan.

Bentuk fitur-fitur prosodik berupa tekanan pada kata-kata tertentu juga dipakai para politisi. Tampak ada penggunaan fitur-fitur prosodik yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu yang menyerang mitra tutur atau yang memuji diri sendiri. Dari aplikasinya tampak bahwa penggunaan bentuk



fitur-fitur prosodik ada yang dipakai untuk menyerang lawan bicara dan ada pula yang dipakai untuk memuji diri sendiri atau menonjolkan diri dalam pertuturan agar mendapatkan perhatian.

Apa saja faktor yang mempengaruhi para politisi melakukan pelanggaran atau menaati prinsip-prinsip kesantunan berbahasa? Dari perjalanan debat yang ada tampak sekali bahwa faktor pendorongnya adalah keinginan untuk memaksimalkan kerugian kepada lawan debat (hal ini merupakan pelanggaran terhadap maksim kebijaksanaan) dan keinginan untuk meminimalkan penghargaan kepada lawan debat (hal ini merupakan pelanggaran terhadap maksim penerimaan dan maksim cara). Adapun faktor-faktor yang mendorong ditaatinya kaidah kesantunan oleh para politisi ialah a) keinginan untuk meminimalkan ketidaksetujuan pada orang lain dan memaksimalkan kesetujuan di antara mereka (sebagai penerapan dari maksim kecocokan), b) keinginan untuk tidak menyatakan sesuatu yang tidak diyakini kebenarannya karena tidak cukup memiliki bukti (sebagai penerapan dari maksim kualitas), dan c) keinginan untuk menyatakan sesuatu yang harus jelas berhubungan dengan tujuan komunikasi (sebagai penerapan dari maksim relevansi).

## **SIMPULAN**

Berkat internet, politisi kini dapat dengan mudah muncul di depan umum (publik) melalui chanel Youtube di internet, memframing dirinya menjadi “public figure” untuk mengoleksi calon pemilihnya. Akan tetapi, dari perilaku berbahasanya mereka sering mendapatkan sorotan karena bahasanya dipandang kurang santun, suka berbohong, suka mengumbar janji, dan tidak jujur. Untuk membuktikan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian. Berdasarkan alat ukur yang mengaplikasikan maksim-maksim kesantunan dalam Teori Kerja Sama Grice (1973) dan Leech (1983) secara eklektis diperoleh hasil bahwa tingkat kesantunan berbahasa para politisi masih tergolong santun.

Bentuk satuan verbal yang digunakan oleh para politisi dalam debat berupa pilihan kata, pernyataan deklaratif, pernyataan imperatif, dan fitur-fitur prosodik. Satuan verbal yang tampak dominan dipakai para politisi adalah

pilihan kata yang lebih mengacu kepada kekuasaan. Bentuk pilihan kata pada kata-kata tertentu yang berima apik dipakai untuk menonjolkan diri dalam pertuturan dan menarik perhatian. Bentuk satuan verbal deklaratif yang digunakan oleh para politisi dalam berdebat memiliki struktur kalimat kompleks yang panjang. Hal ini dipilih karena ada kaitannya dengan keinginan untuk mendapatkan kesempatan berbicara lebih banyak untuk menguasai jalannya percakapan. Struktur kalimat kompleks yang cenderung panjang membuat pembicaraan sulit dipotong atau disela lawan tutur. Bentuk fitur prosodik yang dipakai para politisi berupa tekanan pada kata-kata tertentu yang menyerang mitra tutur atau yang memuji diri sendiri.

Faktor pendorong para politisi melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kesantunan berbahasa adalah keinginan untuk memaksimalkan kerugian kepada lawan debat dan keinginan untuk meminimalkan penghargaan kepada lawan debat (merupakan pelanggaran terhadap maksim penerimaan dan maksim cara). Adapun faktor pendorong ditaatinya prinsip-prinsip kesantunan oleh para politisi ialah keinginan untuk meminimalkan ketidaksetujuan pada orang lain dan memaksimalkan kesetujuan di antara mereka (sebagai penerapan dari maksim kecocokan), keinginan untuk tidak menyatakan sesuatu yang tidak diyakini kebenarannya karena tidak cukup memiliki bukti (sebagai penerapan dari maksim kualitas), dan keinginan untuk menyatakan sesuatu yang harus jelas berhubungan dengan tujuan komunikasi (sebagai penerapan dari maksim relevansi).

## DAFTAR PUSTAKA

- Brown, P. dan Stephen C. Levinson. 1978. *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Grice, H.P. 1975. *Logic and Conversation*. Reprinted from Cole et al. 2004. *Syntax and Semantic 3: Speech Arts*. With permission from Elsevier.
- Hikmat, M.M. 2010. *Komunikasi Politik: Teori dan Praktik*. Bandung: SimbiosisRekatama Media.
- Leech, G. 1983. *Principles of Pragmatics*. London and New York: Longman.
- Levinson, S.C. 1983. *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Simpem, I.W. 2008. “Kesantunan Berbahasa pada Penutur Bahasa Kambera di Sumba Timur” (*disertasi*). Denpasar: Universitas Udayana.
- Sosiowati, I Gusti Ayu GDE. 2013. *Kesantunan Bahasa Politisi dalam Talk Show di Metro TV* (*disertasi*). Denpasar: Universitas Udayana.
- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.